

Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Di Indonesia

Bambang Giyanto, Pradina Kurnia, Kaisar Julizar, Dian Kartika Sari, Dedi Hartono
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Ministry of Education, Culture, Research and Technology encourage educational units and educators to learn and share with each other through learning communities supported by the Merdeka Mengajar Platform (PMM) and various other resources. This research aims to analyze the implementation of learning community policies in the independent learning curriculum in Indonesia based on the policy implementation perspective of Van Meter and Van Horn. The method used in this research is qualitative through literature study. The results of the research show that learning communities, which are considered as a strategy to increase competency for teaching staff, still encounter several obstacles in their implementation, such as inadequate facilities owned by members of the learning community, lack of motivation for teaching staff to join the learning community, support from the school principal. it is not yet real, there is no clarity on the topic of discussion at each learning community meeting and there is no regular evaluation of the learning community.

Keywords: *policy implementation, learning community, independent*

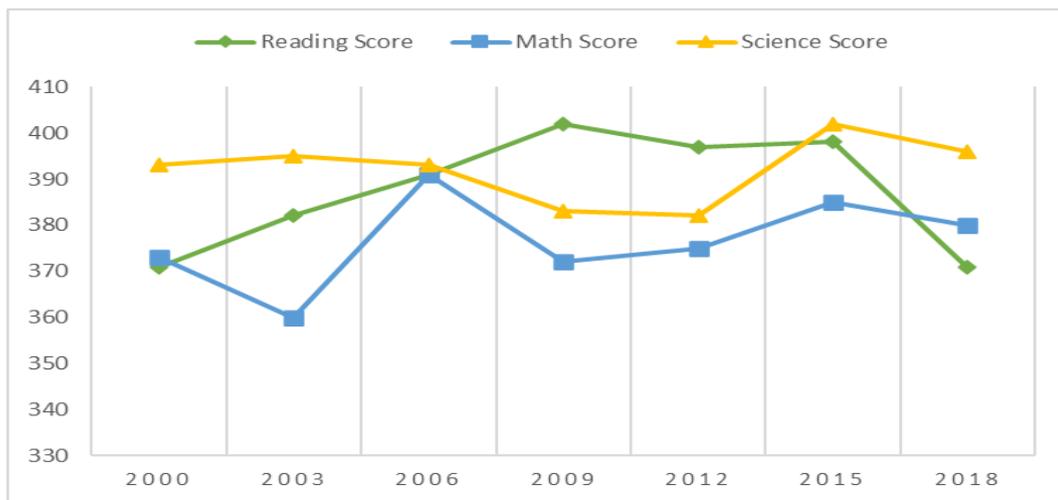
Abstrak

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong satuan pendidikan dan pendidik untuk saling belajar dan berbagi melalui komunitas belajar yang didukung Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan beragam sumber daya lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunitas belajar dalam kurikulum merdeka belajar di Indonesia berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas belajar yang dianggap sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi bagi para tenaga pendidik, dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan seperti belum memadainya fasilitas yang dimiliki oleh para anggota komunitas belajar, kurangnya motivasi para tenaga pendidik untuk mengikuti komunitas belajar, dukungan kepala sekolah belum real, belum ada kejelasan topik bahasan pada setiap pertemuan komunitas belajar dan belum ada evaluasi berkala pada komunitas belajar.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, komunitas belajar, merdeka belajar

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ketimpangan sumber daya dan fasilitas di masing-masing daerah dianggap sebagai faktor utama mutu pendidikan di Indonesia selalu berada di jajaran posisi terbawah studi-studi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Sejumlah laporan menunjukkan pendidikan Indonesia sulit beranjak dari deretan posisi terbawah. Bahkan gangguan dari pendidikan di Indonesia berasal dari perubahan sistem pembelajaran dan penundaan atau bahkan penghapusan beberapa kegiatan akademik (Suryanto, A., et al., 2022). Nilai *Programme for International Student Assessment (PISA)* Indonesia pada tahun 2018 juga tidak berbeda jauh dengan nilai tahun 2012. Hal lain yang mencengangkan adalah sebagian besar siswa di usia 15 tahun mengalami buta huruf fungsional, yaitu dapat membaca teks namun tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai teks tersebut (World Bank, 2018). Jika membandingkan hasil nilai PISA pada tahun 2012 dan 2018, dapat dikatakan selama 10 tahun upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia belum membuahkan hasil yang signifikan.



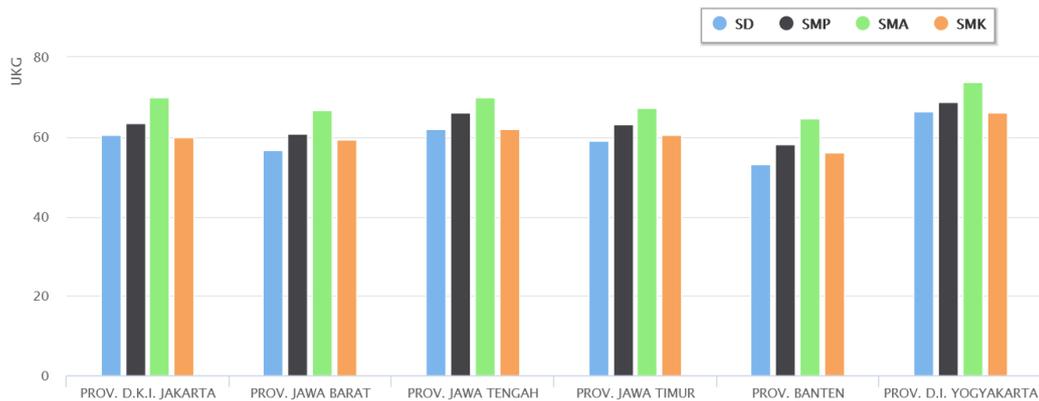
Gambar 1 Nilai PISA Indonesia Periode 2000 - 2018

Sumber: Wuryanto, Hadi dan Abduh, Moch, 2022

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan besar dari kurikulum ini adalah berkembangnya karakter dan keterampilan lunak siswa yang akan lebih diimplementasikan di dunia kerja. Kurikulum ini berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus benar-benar memerdekakan peserta didik baik secara fisik maupun mental, secara jasmani maupun rohani. Dalam upaya perbaikan ini, peran guru dan tenaga pendidikan memiliki peranan yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka.

Akselerasi transformasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dan tenaga pendidik. Namun, berbagai studi selalu menunjukkan bahwa saat ini guru masih memberikan pembelajaran konvensional, yaitu mengajar dengan hanya berfokus pada memberikan pengetahuan sesuai dengan buku teks yang disediakan, belum menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan ruang kreativitas kepada siswa (Pratiwi dkk, 2019). Banyak guru juga masih belum mampu mengembangkan karakter dan membangkitkan keingintahuan belajar siswa, sehingga keterampilan siswa dalam menghadirkan keterampilan berpikir tinggi (*higher order thinking skills*) masih rendah (Renstra Kemdikbud 2020-2024). Hal ini juga ditambah dengan distribusi guru yang tidak merata di Indonesia. Perlu adanya skala redistribusi guru untuk mengalokasikan guru secara lebih merata. Perbaikan mutu pendidikan dan perluasan akses terhadap pendidikan menengah akan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik yang saat ini dicurahkan bagi pendidikan (World Bank: 2013).

Hasil uji terhadap kompetensi guru yang dilakukan tahun 2019 seperti mengonfirmasi bahwa kompetensi guru di Indonesia memang masih rendah. Nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019 tertinggi yang bisa dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,80, guru jenjang SMP sebesar 58,60, dan untuk guru jenjang SMA sebesar 62,30. Jika diagregasi, rata-rata nilai UKG nasional hanya 57 dari nilai maksimal 100 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).



Gambar 2 Data UKG untuk 5 (lima) provinsi di Pulau Jawa tahun 2019

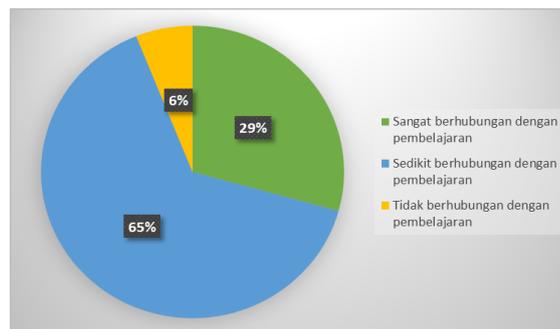
Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)

Berbagai dukungan diberikan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Bentuk dukungan tersebut beragam, seperti penyediaan bahan pendukung kurikulum di sekolah serta platform guru agar dapat belajar bersama, diskusi publik terkait perencanaan kebijakan pendidikan, basis data untuk memantau kualitas sekolah, dan berbagai kebijakan lain (Drabsch, 2013). Kemdikbudristek mendorong satuan pendidikan dan pendidik untuk saling belajar dan berbagi melalui komunitas belajar yang didukung Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan beragam sumber daya lainnya. Komunitas belajar adalah kelompok pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah atau antar sekolah yang menjadi wadah untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi secara rutin dan terjadwal untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Komunitas Belajar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu komunitas belajar intra sekolah (komunitas belajar guru dalam satu sekolah), komunitas belajar antarsekolah (komunitas belajar yang terdiri dari guru-guru dari beberapa sekolah), dan komunitas belajar melalui PMM (Ferayanti, M., Nissa, H., dkk., 2023). Komunitas belajar di dalam sekolah merupakan kelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi wadah belajar dan berbagi secara rutin untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sementara komunitas belajar antar sekolah merupakan himpunan guru-guru dari beberapa sekolah yang membentuk komunitas belajar bersama. Pada jenjang sekolah dasar, misalnya dikenal Kelompok Kerja Guru (KKG), sedangkan di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sedangkan Komunitas belajar melalui PMM ini dibentuk secara virtual dengan menggunakan fungsi PMM. Komunitas yang terdaftar di PMM dapat berupa komunitas dalam sekolah atau komunitas antar sekolah. Komunitas ini merupakan komunitas online yang dapat melakukan kegiatan belajar bersama tanpa dibatasi oleh lokasi dan jarak.

Pembentukan komunitas belajar bertujuan memberikan edukasi pada anggota komunitas yang mendorong peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Keterlibatan guru dalam ruang diskusi di komunitas belajar diharapkan dapat menjadi sarana *sharing knowledge* dalam penyelesaian masalah. Bahkan saat ini guru tidak lagi dianggap sebagai pihak yang paling berwibawa terhadap materi yang dibahas, tetapi justru sebagai fasilitator dan mitra diskusi. Dalam dunia pendidikan, pendekatan serupa muncul melalui apa yang disebut komunitas pembelajaran profesional. Alih-alih mengajar, pendekatan ini berfokus pada pembelajaran, kegiatan kolaboratif, dan kinerja atau pengembangan kapasitas (Suryanto, A., Prasetyo, A. G., et al., 2023). Diketahui bahwasanya pembelajaran sejauh ini berjalan cukup baik, terutama metode diskusi ringan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam (Suryanto, A., et al., 2023). Pembelajaran jauh lebih efektif ketika bersifat *informal learning*, yang mana pembelajaran dibentuk melalui forum diskusi di antara kolega, mentor, sampai dengan *stakeholder* lainnya dalam suasana informal, rileks, dan

yang jauh lebih menyenangkan (Suryanto, A., 2018). Bahkan, variabel mediasi menjadi faktor penting untuk membangun pengembangan karir dan kompetensi seseorang. Melalui lingkungan yang positif berdampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang (Karunia, R. L., et al., 2023). Namun yang menjadi persoalan adalah, hanya 29% topik diskusi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran dalam kelompok belajar. Perencanaan pembelajaran, asesmen awal pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, pelatihan guru, aktivasi akun belajar.id dan pemanfaatan PMM idealnya mendominasi topik diskusi. Faktanya, diskusi lebih sering dilakukan untuk topik lain, seperti penerimaan siswa baru, persiapan visitasi akreditasi, beban kerja guru, dan pendapatan/tunjangan sertifikasi guru (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023).



Gambar 3 Kesesuaian Topik dalam Kegiatan Komunitas Belajar dengan Pembelajaran

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kelompok belajar yang selama ini dilakukan. Hasil dari kajian implementasi dapat memberikan informasi penting untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan ini. Jika ada area di mana kebijakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan atau jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu diatasi, maka perbaikan dapat dilakukan. Kajian implementasi juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi, khususnya bagi guru dan tenaga pengajar, dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi komunitas belajar dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang relatif belum diketahui secara mendalam atau belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam riset ini adalah *library research*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian artikel, laporan, dan data statistik yang disajikan Peneliti sebelumnya (Robby et al., 2022). Data yang telah dikoleksi kemudian direduksi sesuai keterkaitan data.

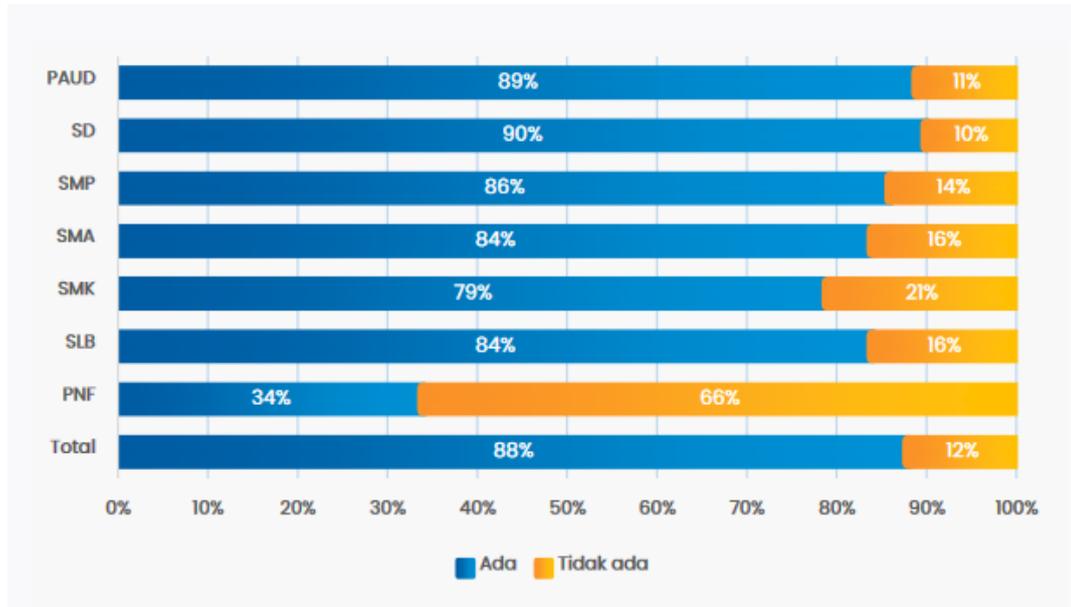
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka Belajar adalah inisiatif dari Kemdikbudristek yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam menentukan jalannya pembelajaran. Inisiatif ini dirancang untuk memungkinkan siswa memilih mata pelajaran, metode pembelajaran, dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi pelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum ini dibangun suatu sistem yang disebut sebagai komunitas belajar. Tujuannya, guru dan tenaga pendidik sebagai penggerak pembelajaran memiliki wadah untuk saling berbagi dan meningkatkan kompetensi.

Kebijakan komunitas belajar dalam Implementasi kurikulum merdeka merupakan wadah bagi proses belajar guru atau tenaga pendidik agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Zhu & Baylen dalam (Sekar, 2020) menyebutkan bahwa komunitas belajar adalah suatu wadah yang berfokus pada visi kelompok dengan bekerja sama membagi pengetahuan dengan tujuan akademik.

Kebijakan ini penting untuk dikomunikasikan kepada satuan-satuan pendidikan dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Salah satunya adalah melalui Surat Edaran tentang Optimalisasi Komunitas Belajar yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek pada tahun 2023 yang menekankan perlunya setiap satuan pendidikan untuk memiliki komunitas belajar baik intra sekolah maupun antar sekolah yang bersifat inkuiri juga melakukan *sharing* atau berbagi praktik baik dalam platform merdeka mengajar secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat sesuai kewenangannya perlu untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan evaluasi dalam setiap proses pelaksanaan komunitas belajar. (kemdikbud.go.id).

Data yang disampaikan Kemendikbudristek menyatakan 88% sekolah telah memiliki komunitas belajar guru intra sekolah. Meskipun angka ini dapat dikategorikan cukup tinggi, tetapi ketiadaan komunitas belajar menjadi keluhan dari beberapa tenaga pengajar. Diskusi informal antar guru menjadi ajang untuk bertukar pendapat dalam menghadapi kesulitan di sekolah yang belum memiliki kelompok belajar. Dalam pendidikan formal, jenjang Sekolah Menengah Kejuruan menjadi persentase terbesar yang belum memiliki kelompok belajar.



Gambar 4 Keberadaan Komunitas Belajar Intrasekolah

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Disparitas keberadaan komunitas belajar ini memunculkan pertanyaan terkait implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar. Implementasi kebijakan ini ditelaah dengan menggunakan teori implementasi dengan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses

implementasi kebijakan Merdeka Belajar khususnya dalam “Komunitas Belajar” dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi**

Dalam kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi memainkan peran penting dalam pengaruh terhadap implementasi komunitas belajar. Implementasi komunitas belajar membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai organisasi terkait dalam sistem pendidikan dengan guru dan tenaga pendidik sebagai pelaksana dalam komunitas belajar. Aktivitas implementasi melibatkan serangkaian langkah konkret dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut untuk menerapkan konsep komunitas belajar. Ini mencakup alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, dan perencanaan program pembelajaran.

Komunikasi antar organisasi adalah fondasi dari kolaborasi yang efektif. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan komunitas belajar tercapai dengan sukses. Hal ini mencakup pertukaran informasi, diskusi strategi, dan pemecahan masalah bersama. Dengan adanya komunikasi yang kuat, organisasi-organisasi dapat saling memahami tujuan, kebutuhan, dan tantangan masing-masing, sehingga memungkinkan mereka untuk berkolaborasi secara efektif dalam mewujudkan visi komunitas belajar. Oleh karena itu, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan komunitas belajar untuk mencapai tujuannya.

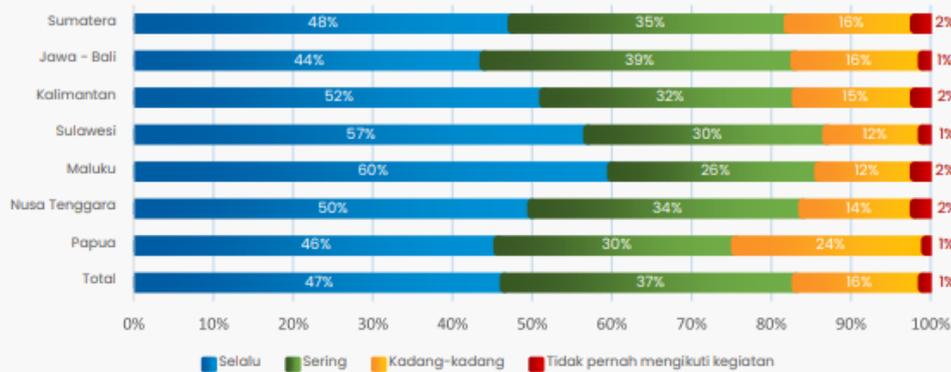
Kondisi dan kesiapan setiap satuan pendidikan yang berbeda-beda membuat tawaran opsi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka terasa lebih realistis dibandingkan memaksakan model penerapan yang sama. Satuan pendidikan dapat memilih menerapkan beberapa prinsip dari Kurikulum Merdeka, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan prinsip pembelajaran dan asesmen, sembari tetap menerapkan konten kurikulum sebelumnya (opsi Mandiri Belajar), atau mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh dengan menggunakan berbagai perangkat ajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek (opsi Mandiri Berubah). Sementara bagi satuan pendidikan yang lebih siap, dapat menerapkan kurikulum ini dengan menyusun dan merancang secara mandiri berbagai perangkat ajar yang dibutuhkan (opsi Mandiri Berbagi).

Tiga opsi penerapan kurikulum ini memberi kebebasan serta menguatkan komitmen satuan pendidikan dan pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum tanpa paksaan. Namun demikian penerapan di lapangan dalam komunitas belajar tentunya akan menimbulkan ambiguitas dan kebingungan bahwa komunitas belajar tersebut sedang menjalankan opsi yang mana dari ketiga opsi yang ada (Opsi Mandiri Belajar, Opsi Mandiri Berubah dan Opsi Mandiri Berbagi). Selanjutnya adanya opsi-opsi tersebut menyulitkan untuk standardisasi terutama dalam kelompok belajar. Katakanlah suatu kelompok belajar guru sedang melakukan Opsi Mandiri Belajar, Opsi Mandiri berubah atau Opsi Mandiri berbagi. Untuk itu diperlukan komunikasi intensif diantara satuan pendidikan dengan pemerintah dalam menentukan pilihan perangkat ajar yang sesuai.

2. **Karakteristik dan agen pelaksana/implementor**

Aktivasi komunitas belajar yang menjadi wadah belajar mandiri bagi guru dan kepala sekolah. Dari analisis terhadap hasil pengisian instrumen refleksi, terdapat sekitar 91% kepala sekolah telah tergabung dalam komunitas belajar. Berbagai kegiatan belajar bersama dan berbagi yang terjadi pada komunitas belajar diharapkan dapat menguatkan pemahaman guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Keberadaan komunitas belajar ini

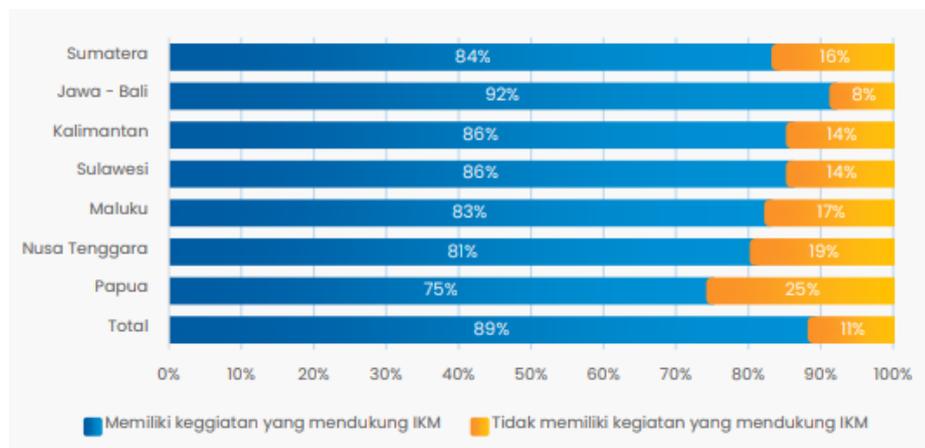
juga dapat menjadi solusi terdekat bagi pendidik dan kepala sekolah yang belum memiliki kebiasaan belajar mandiri melalui aplikasi maupun menyaksikan webinar. Namun, hasil refleksi menunjukkan bahwa kepala sekolah yang tergabung dalam komunitas belajar belum sepenuhnya aktif, misalnya terdapat sekitar 15% kepala sekolah yang mengikuti kegiatan hanya sewaktu waktu saja, bahkan terdapat sebagian kecil lainnya yang sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan komunitas belajar meskipun mereka tergabung di dalamnya.



Gambar 5 Keaktifan Kepala Sekolah Mengikuti Kegiatan Komunitas Belajar

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Kemendikbudristek menyusun instrumen yang ditujukan kepada kepala sekolah untuk memantau aktivitas komunitas belajar. Sebanyak 85% responden kepala sekolah yang melakukan self assessment menyatakan komunitas belajarnya memiliki kegiatan yang mendukung IKM. Topik pada kegiatan komunitas belajar yang dilakukan meliputi pelatihan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka (81%), diskusi/refleksi kesiapan sekolah (81%), kegiatan berbagi praktik baik (53%), serta pendampingan oleh rekan sejawat (52%). Responden yang menyatakan belum memiliki kegiatan untuk mendukung IKM tercatat di angka 11%. Komunitas Belajar yang belum memiliki kegiatan mendukung IKM paling banyak ditemukan di Papua, Sumatra, Nusa Tenggara, dan Maluku (Gambar 6). Hal ini menjadi cerminan bahwa kondisi geografis dari para tenaga pendidik yang tersebar di seluruh negeri bukanlah perkara mudah. Ketersediaan jaringan teknologi dari pendidik yang berada di daerah terpencil menjadi salah satu masalah dalam kebijakan ini selaras dengan studi (Suryanto et al. 2023).



Gambar 6 Aktivitas Komunitas Belajar untuk Mendukung IKM

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Dorongan agar guru dapat belajar melalui sumber-sumber yang tersedia baik secara individu maupun bersama melalui komunitas belajar merupakan perubahan dari paradigma “menunggu undangan pelatihan” menjadi “menjemput pengetahuan melalui sumber-sumber yang tersedia”. Perubahan paradigma ini juga merupakan upaya memberdayakan otonomi satuan pendidikan dan guru agar lebih memiliki ownership dan tanggung jawab terhadap perubahan yang sedang digalakkan. Strategi pemberdayaan ini sejalan dengan paradigma Merdeka Belajar, di mana satuan pendidikan dan pendidik berposisi sebagai agensi yang aktif terlibat dalam transformasi perbaikan mutu pendidikan, salah satunya melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Meskipun demikian, upaya pemberdayaan ini tentu memiliki berbagai tantangan. Mengubah paradigma dari “menunggu” menjadi “menjemput” misalnya, mengandaikan adanya sikap aktif dan inisiatif dari satuan pendidikan dan guru.

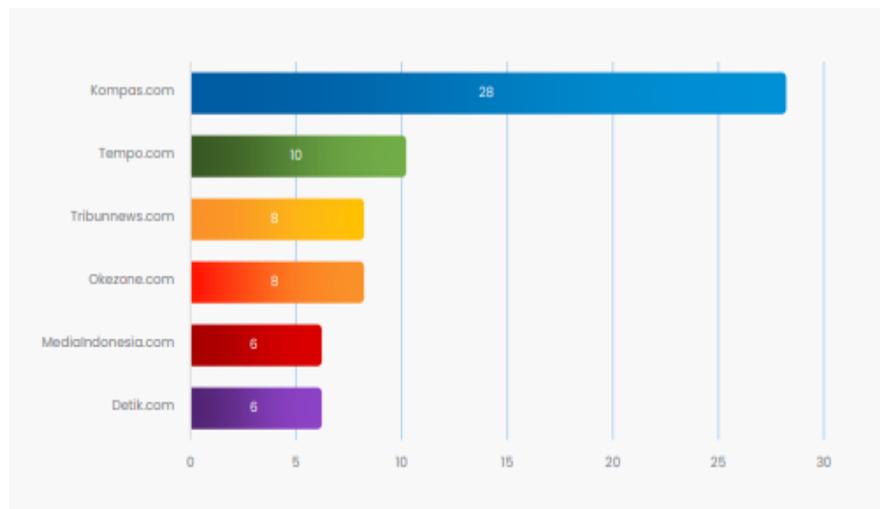
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dalam komunitas belajar dilakukan dengan cara kolaborasi untuk saling berinteraksi secara langsung yang esensial dengan tujuan membantu para tenaga pendidik mengembangkan kompetensi dari berbagai disiplin ilmu namun pembelajaran yang melibatkan interaksi dan hubungan antara individu dalam konteks sosial semacam ini tentunya perlu untuk mempertimbangkan perbedaan sosial seperti latar belakang budaya, agama, ras, gender, dan kelompok sosial lainnya agar para peserta merasa dihargai dan diterima secara sosial. Hal ini selaras dengan penelitian Rahayu, Dhiallah, dan Marsha 2023 dan Adriwati, 2021.

Pelaksanaan komunitas belajar dalam kurikulum merdeka dipengaruhi berbagai faktor. Selain dari faktor dukungan sekolah dan inisiatif tenaga pendidik itu sendiri, implementasinya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Latar belakang ekonomi yang beragam dari para peserta komunitas belajar menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan ini. Adanya pemahaman tambahan pekerjaan idealnya disertai dengan tambahan penghasilan seringkali menjadi kendala. Kondisi pendapatan guru non pegawai negeri juga menjadi penghambat. Disparitas penghasilan ini mendorong tenaga pendidik mencari penghasilan tambahan dalam waktu kosongnya, sehingga kurang termotivasi dalam pengembangan kompetensi.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan, "dukungan politik" mengacu pada sejauh mana kebijakan mendapatkan dukungan atau oposisi dari berbagai aktor politik, termasuk anggota parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, dan publik. Sentimen media adalah salah satu aspek dari dukungan politik, karena media memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik dan memobilisasi dukungan atau oposisi terhadap suatu kebijakan. Media berperan penting dalam menarik perhatian publik dan bermanfaat pula sebagai sumber informasi kebijakan (Baumgartner & Jones, 1993). Selain menggambarkan reaksi publik, peran media sebagai sumber informasi juga menjadi faktor penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan (Daddow, 2019).

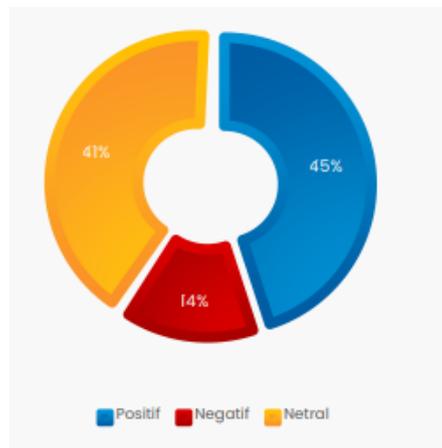
Kemendikbudristek melakukan analisis pemberitaan mengenai Kurikulum Merdeka pada periode 11 Februari – 4 Maret 2022. Analisis dilakukan terhadap 6 media dan 66 artikel. Sebagian besar pemberitaan bernada positif. Kompas.com merupakan media dengan jumlah pemberitaan mengenai Kurikulum Merdeka yang paling banyak dibandingkan lima media lainnya. Jika dibandingkan dengan topik pemberitaan lain dalam periode yang sama, jumlah artikel terkait Kurikulum Merdeka masih sangat sedikit dibandingkan isu lain, misalnya terkait topik “pembelajaran tatap muka”. Melalui filter pencarian di laman Detik.com saja, misalnya, ditemukan sekitar 155 topik mengenai “pembelajaran tatap muka” sepanjang 11 Februari hingga 4 Maret 2022 (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023).



Gambar 7 Jumlah Artikel yang Membahas Topik “Kurikulum Merdeka”

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Penting pula untuk memahami tanggapan masyarakat secara umum. Sebagai kebijakan baru di bidang pendidikan, pelaksanaan kebijakan IKM mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, mulai dari yang menyambut baik hingga yang mempertanyakan. Reaksi ini dapat tergambarkan dari berbagai respon masyarakat dalam percakapan di media sosial, contohnya Twitter. Dari 1.502 unggahan di Twitter mengenai Kurikulum Merdeka pada periode 11 Februari - 4 Maret 2022, sejumlah 45% unggahan mengenai KM bernada positif, 41% netral, dan 14% lainnya bernada negatif (Gambar 8).



Gambar 8 Respons dan Sentimen Publik di Twitter mengenai Topik Kurikulum Merdeka

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Sentimen bernada netral ditunjukkan pada unggahan yang me-retweet mengenai informasi atau pemberitaan Kurikulum Merdeka. Respons bernada netral tersebut umumnya dilakukan oleh akun media sosial milik laman berita. Sentimen bernada positif misalnya berkaitan dengan respons publik mengenai keunggulan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka dalam praktik pembelajaran. Sedangkan pada sentimen bernada negatif umumnya berkaitan dengan pandangan bahwa perubahan kurikulum cenderung menyulitkan dan membingungkan guru atau siswa, serta anggapan bahwa perubahan kurikulum terkait dengan

kepentingan politik semata. Berbagai respons yang ditunjukkan di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya terkait dengan belum utuhnya pemahaman publik terkait dengan konsep kebijakan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, terutama pada saat proses pendaftaran kurikulum ini di awal tahun 2022.

Komentar masyarakat dalam media sosial dan pemberitaan yang dilakukan media dapat menjadi cerminan respon warga secara umum atas kurikulum merdeka. Berdasarkan kondisi ini, dapat terlihat bahwa masyarakat belum memiliki minat yang tinggi atas kebijakan yang diambil pemerintah. Akibatnya, pemerintah belum mendapatkan banyak masukan dari sisi warga sebagai pihak yang terdampak kebijakan. Kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat ini juga mempengaruhi motivasi guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kurikulum merdeka dan komunitas belajar.

4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ implementor.

Sikap pasif dan menunggu arahan bukan hanya tidak relevan dengan kebijakan Merdeka Belajar, tetapi juga dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan. Implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan tidak sebatas mengubah dokumen kurikulum lama menjadi format baru, melainkan secara bertahap dapat mengubah praktik pembelajaran menjadi lebih baik. Melalui perbaikan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka peningkatan hasil belajar siswa akan lebih mudah dicapai. Guna memastikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan evaluasi mulai dari proses pendaftaran satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan implementasi, hingga dampak dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Para guru umumnya mempersepsikan bahwa komunitas belajar yang ada di sekolah memegang peranan penting dalam membentuk pembiasaan belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan sesamanya. Persepsi positif mengenai manfaat komunitas belajar ini dibentuk oleh anggapan bahwa guru merasa lebih efektif belajar dengan rekan sejawat mereka, terutama di sekolah yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru menyatakan bahwa komunitas belajar di sekolah efektif dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam pembelajaran, karena memudahkan guru berbagi, mendapatkan informasi/sumber belajar, dan komunitas belajar memudahkan guru menyelesaikan hambatan belajar siswa.



Gambar 9 Alasan Komunitas Belajar Dinilai Tidak Efektif oleh Guru

Sumber: (Nur Rakhmah, Diyan dkk., 2023)

Di sisi lain, sebagian kecil guru menganggap keberadaan komunitas belajar belum efektif. Hal itu disebabkan beberapa alasan, antara lain karena komunitas belajar belum memiliki refleksi berkala oleh anggota komunitas, belum ada evaluasi berkala oleh kepala sekolah, guru lebih efektif belajar secara individu, dan topik yang didiskusikan belum berdasarkan kondisi dan kebutuhan. Sementara itu, persepsi guru terkait efektivitas komunitas belajar cukup berbeda dengan kepala sekolah. Hampir seluruh kepala sekolah menyatakan telah memberi dukungan pada komunitas belajar yang ada di sekolah mereka. Bentuk dukungan yang diberikan seperti mengimbuu guru untuk aktif dalam komunitas belajar, mendorong pemanfaatan sumber belajar mandiri dari Kemendikbudristek, menyediakan sarana prasarana untuk memfasilitasi kegiatan komunitas belajar, serta mendukung kegiatan *sharing* dengan komunitas belajar di sekolah lain. Namun, bentuk dukungan oleh kepala sekolah ini tidak sepenuhnya ditangkap oleh guru sebagai “dukungan”, karena belum bersifat riil, sehingga bagi guru dukungan tersebut masih kurang memadai.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan komunitas belajar yang dianggap sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi bagi para tenaga pendidik, dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Fasilitas yang dimiliki oleh para anggota komunitas belajar belum memadai
2. kurangnya motivasi para tenaga pendidik untuk mengikuti komunitas belajar
3. Dukungan kepala sekolah yang belum bersifat riil
4. Belum ada kejelasan topik bahasan pada setiap pertemuan komunitas belajar
5. Belum ada evaluasi berkala pada komunitas belajar

SARAN

Saran terhadap perbaikan dan penyempurnaan bagi implementasi kebijakan komunitas belajar ini ke depan yaitu :

1. Optimalisasi kolaborasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan komunitas belajar
2. Perlu dibuat mekanisme kegiatan komunitas belajar agar tercipta suasana dan program yang lebih jelas, efektif dan efisien
3. Membangun komitmen dari semua pemangku kepentingan agar komunitas belajar dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan tujuan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Adriwati. 2021. “Readiness of Indonesia Telecommunication Business Incumbent in Facing Disruption Era.” *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18(08): 2476–87. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/9177>.
- Baumgartner, F. and Jones, B. 1993. *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Daddow, O. 2019. *Policy Success and Failure: Embedding Effective Learning in Government*. University of Cambridge: The Bennett Institute for Public Policy.

- Drabsch, J. 2013. Briefing Paper NSW Parliamentary Service: The Australian Curriculum. Online. ([http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlament/publications.nsf/0/B18363C26EC0F93ACA257B1800144FDE/\\$File/The%20Australian%20Curriculum.pdf](http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlament/publications.nsf/0/B18363C26EC0F93ACA257B1800144FDE/$File/The%20Australian%20Curriculum.pdf)). Diakses 12 Oktober 2023.
- Ferayanti, M., Nissa, H., dkk. 2023. Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Prasetyo, J. H., Triyadi, T., & Ariawan, J. (2023). The effectiveness of career development in mediating the influence of the working environment and training towards the performance of employee. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 17(2), 202-210. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i2.1098>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Data Uji Kompetensi Guru. Online. (<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>). Diakses 12 Oktober 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://static.skm.kemdikbud.go.id/>. diakses 15 Oktober 2023.
- Nur Rakhmah, Diyan dkk.,. 2023. Laporan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Pertama 2022. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Pratiwi, Lukman, Rakhmah, Utama. 2019. Regulasi Guru dalam Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran. Pusat Penelitian Kebijakan.
- Rahayu, Neneng Sri, Muhammad Hasan Dhiullah, and Alvita Marsha. 2023. "Utilizing E-Learning and User Loyalty with User Satisfaction as Mediating Variable in Public Sector Context." *International Journal of Data and Network Science* 7(3): 1341–48.
- Robby, S. K. I., Abdilah, D., & Faiz, A. 2022. *Implementasi Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid-19: Proses Pembelajaran dan Hambatan*. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 234–239. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3366>
- Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan efektifitas pelatihan kepemimpinan: telaah teoretis dan empiris. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 69-86. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.337>
- Suryanto, A., Firdaus, M., Aswi, A., & Tamsir, F. A. (2023). The Challenges and Opportunities in the Implementation of E-Learning for Competence Development of State Civil Apparatus. *Information Sciences Letters*, 12(5), 2165-2175.
- Suryanto, A., Fitriati, R., Natalia, S. I., Oktariani, A., Munawaroh, M., Nurdin, N., & AHN, Y. (2022). Study of working from home: the impact of ICT anxiety and smartphone addiction on lecturers at NIPA School of Administration on job performance. *Heliyon* 8 (12), e11980 (2022).
- Suryanto, A., Prasetyo, A. G., Nurdin, N., & Aswad, M. (2023). The reform of apparatus competence development in Indonesia: improving the implementation system and the implementing actors. *Information Sciences Letters*, 12(4), 1307-1317.
- Sekar, Ayu Yunita dan Kamarubiani, NIke. 2020. Komunitas Belajar Sebagai Sarana Belajar dan Pengembangan Diri. Vol. 2, No. 1, Agustus 2020

- World Bank. 2013. *Mendayagunakan Guru dengan Lebih Baik: Memperkuat Manajemen Guru untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manfaat Belanja Publik*. Naskah Kebijakan, Januari 2013.
- World Bank. 2018. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise (WDR 2018)*. Washington, DC: World Bank.
- Wuryanto, H. dan Abduh, M. 2022. *Mengkaji Kembali Hasil PISA sebagai Pendekatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi*. Online. (<https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/mengkaji-kembali-hasil-pisa-sebagai-pendekatan-inovasi-pembelajaran--untuk-peningkatan-kompetensi-li>). Diakses 12 Oktober 2023.
- Van Meter, D. and Van Horn, C. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Framework*. *Journal Administration and Society*.

